

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa dan tingkat kemiskinan suatu negara merupakan salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pembangunan harus diarahkan kearah yang jelas sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi setiap manusia yang diakui secara umum.

Konstitusi Indonesia UUD 1945, secara tegas mengakui hal itu dengan mengatakan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian hidup layak dan sejahtera adalah hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan sudah merupakan tugas pemerintah untuk membantu mewujudkan hal tersebut.pembangunan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dituntaskan.

Pembangunan manusia adalah suatu upaya bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan upaya untuk menyediakan lapangan kerja. Salah satu parameter untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan sumber daya manusia. Menurut pandangan The United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses perluasan pilihan manusia untuk meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Human development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur atau parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan (Baeti,2013)

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dan perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kekuatan bagi suatu wilayah, apabila kualitas sumber daya manusia rendah akan menjadi beban bagi pembangunan di wilayahnya. Pembangunan manusia merupakan patron pembangunan yang beranggapan bahwa manusia adalah aktor utama dalam proses pembangunan di suatu Negara dengan sasaran utama yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). (Hakim, 2013).

pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan lokasi lingkungan merupakan masalah kemiskinan yang saling berkaitan. Maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang harus ditanggapi secara serius dan tuntas karena kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan atau *vicious crycle of poverty* (sukmaraga, 2011).

Perkembangan penduduk miskin di Indonesia setiap tahun selalu berubah sehingga dibutuhkan beberapa program untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang cenderung selalu naik turun agar pembangunan disuatu Negara biAs lebih stabil. Dalam proses pembangunan manusia kemiskinan dapat memberikan efek yang serius karena masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks dalam proses pembangunan manusia. Masalah kemiskinan dapat bermula dari kemampuan daya beli masyarakat dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti tingkat pendidikan dan kesehatan juga turut terabaikan.

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin . dalam upaya pembangunan nasional strategi efektif yang menjadi titik berat untuk menguranginya adalah dengan menurunkan jumlah penduduk miskin (simatupang & dermoredjo, 2003).

Keberhasilan pembangunan nasional suatu Negara dilihat tidak hanya dari dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan dilihat dari tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat diartikan

sebagai suatu upaya pemberdayaan manusia dengan menitikberatkan peningkatan kemampuan dasar manusia untuk turut serta berkontribusi disegala bidang pembangunan (BPS, 2011).

Berdasarkan **TABEL 1.1** menerangkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Asean, Negara Singapura menempati tempat tertinggi dengan skor 91,2 dan yang menduduki peringkat terakhir adalah Negara Myanmar dengan skor 53,6, sedangkan Indonesia menempati posisi ke 5 dari 10 negara-negara Asean dengan skor 68,1.

TABEL 1. 1
Peringkat Indeks pembangunan Manusia Negara-negara ASEAN Tahun 2014

NO	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan peringkat IPM 2009-2014	Rata-rata pertumbuhan (%) 2010-2014	Kelompok
1.	Singapura	91,2	11	11	0,41	Very High
2.	Brunei Darussalam	85,6	31	1	0,37	Very High
3.	Malaysia	77,9	62	1	0,32	High
4.	Thailand	72,6	94	3	0,35	High
5.	Indonesia	68,4	111	3	0,71	High
6.	Filiphina	66,4	115	-1	0,52	High
7.	Vietnam	66,6	118	1	0,47	Medium
8.	Laos	57,5	141	2	1,62	Medium
9.	Kamboja	55,5	143	1	0,87	Medium
10.	Myanmar	53,6	148	1	0,72	Medium

Sumber : (UNDP, 2014)

Berdasarkan Teori Pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0- 100,0 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tinggi / Very High : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas / High : IPM antara 66,0 – 79,9

3. Menengah Bawah / Medium : IPM antara 50,0 – 65,9

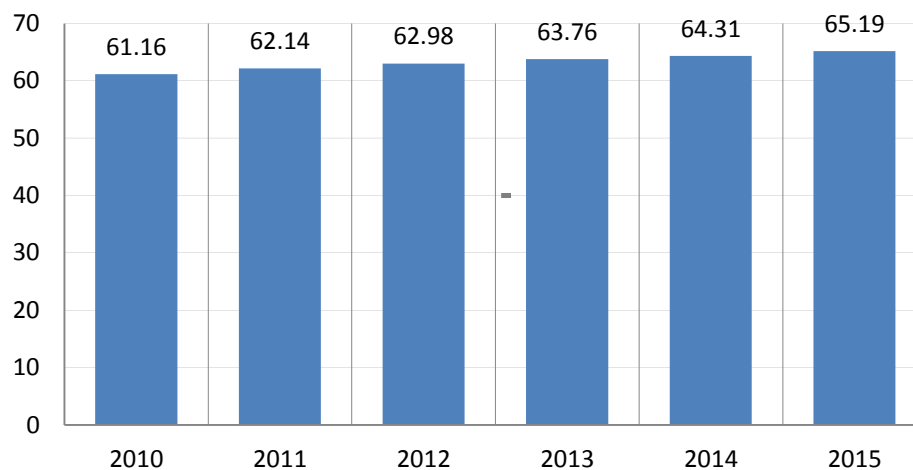
4. Rendah / Low : IPM kurang dari 50,0

Dari data diatas kita bisa melihat bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2014 sebesar 68,4 masih tergolong dalam kelas medium, oleh karenanya pembangunan manusia di Indonesia masih harus ditingkatkan. Bila dibandingkan tahun 2013 indeks pembangunan Indonesia hanya sebesar 68,1 itu artinya indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat sebesar 0,44. Meski mengalami kenaikan peringkat IPM Indonesia berada pada urutan 11 dari 188 negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih kalah dengan Negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia (UNDP, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk membandingkan prestasi pembangunan manusia baik antar Negara maupun antar daerah. Pembangunan manusia menjadi hal pokok karena bilamana suatu daerah tidak memiliki sumber daya alam yang potensial maka dapat mengandalkan Sumber daya manusia yang dimiliki untuk membangun dan memajukan daerah tersebut. Oleh sebab itu Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat *urgent* dalam proses pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan data IPM Nasional Indonesia dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia tersebut harusnya dapat diimbangi pula dengan meningkatnya kualitas hidup rakyat Indonesia. Data diatas juga menunjukkan bahwa ada beberapa provinsi yang nilai indeks pembangunan manusianya masih tergolong rendah. Seperti Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tingkat nasional tahun 2015 provinsi DKI Jakarta memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia dengan nilai 78,39. Dan provinsi Papua adalah provinsi dengan nilai IPM terendah sebesar 56,75. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum merata ke provinsi-provinsi kecil di Indonesia dan hanya terpusat di pulau Jawa saja.



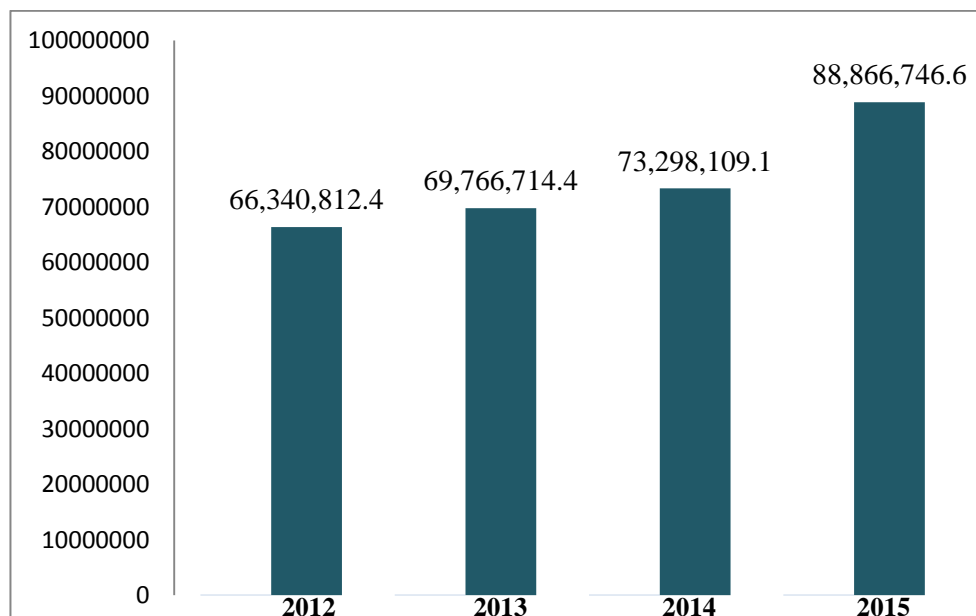
Sumber data : BPS NTB

Gambar 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari **GAMBAR 1.1** sejak tahun 2010 sampai 2015 peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB terus terjadi. Namun taraf Indeks pembangunan di Provinsi NTB tersebut masih tergolong rendah. Terlihat bahwa meski angka IPM Provinsi NTB masih tergolong rendah tapi tiap tahunnya menunjukkan angka yang terus meningkat secara signifikan dan terus berfluktuasi positif dalam kurun waktu tersebut. Meski peringkat bergeser dari posisi 33 naik ke posisi 30 dari 34 provinsi tetapi tetap saja NTB masih berada di urutan bawah. Meningkatnya pertumbuhan Pembangunan manusia di Provinsi NTB tahun 2015

ini ditandai dengan terus meningkatnya IPM dari 64,31 di tahun 2014 menjadi 65,19 pada tahun 2015 atau meningkat 1,36 persen di atas pertumbuhan IPM Nasional yang tumbuh sebesar 0,4 persen (BPS, 2015). Berdasarkan angka IPM di provinsi NTB maka harusnya beban dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi seluruh pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dapat tercapai, tentunya yang harus diutamakan adalah pelayanan publik menyangkut konsep pembangunan manusia.

Dari **Gambar 1.2** pertumbuhan antara tahun 2014 dan 2015 meningkat pesat sebesar 20 % dari PDRB tahun 2014. Produk Domestik regional bruto provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 sebesar Rp. 66,340,812, pada tahun 2013 sebesar Rp. 69,766,714.4, pada tahun 2014 sebesar Rp. 73,298,109, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 88,866,746.6.



Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Gambar 1. 2
PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2015

Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara pesat menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga harusnya diimbangi dengan berkurangnya tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai bersih barang dan jasa dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia juga memberi pengaruh positif bagi penurunan kemiskinan bagi suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada data diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2010-2016 mengalami penurunan yang berarti. Pada tahun 2010 sebesar 21.55%, pada tahun 2011 sebesar 19.73%, pada tahun 2012 sebesar 18.63%, pada tahun 2013 sebesar 17.97%, pada tahun 2014 sebesar 17.24%, pada tahun 2015 sebesar 17.1 %, dan pada tahun 2016 sebesar 16.48%.

Kualitas suatu daerah mencerminkan kualitas sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang berkualitas berarti pula daerah yang berkualitas dimana sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi suatu daerah. Apabila semakin produktif angkatan kerja, semakin tinggi peluang melahirkan terobosan-terobosan baru yang akan menjadi kiat suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dan semakin tinggi kualitas sumber daya manusianya. Salah satu factor yang

menghambat pertumbuhan provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kualitas Sumber Daya Manusianya yang relatif rendah.

Ketika berbicara masalah Sumber Daya Manusia tentu tidak dapat terlepas dari masalah tenaga kerja dan Upah Minimum Regional. Upah Minimum Regional merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan industri baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar yang akan menyerap tenaga kerja. Tingginya Upah Minimum suatu daerah menunjukkan tingkat ekonomi daerah tersebut semakin tinggi.

Upah minimum Regional (UMR) provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang berarti, Upah minimum terbesar yaitu kabupaten Bima dengan UMR sebesar Rp. 1.500.000 pada tahun 2014. Dan UMR terkecil yaitu kabupaten Lombok Timur dengan UMR sebesar Rp. 1.212.000 pada tahun 2014.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten di/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai objek penelitian dikarenakan tingkat IPM provinsi Nusa Tenggara Barat secara faktual menunjukkan peningkatan jika dilihat dari angka absolut dan sejalan dengan peningkatan IPM nasional. Namun jika dilihat berdasarkan peringkat antar provinsi belum dapat menandingi provinsi-provinsi lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat harus puas berada pada urutan 30 setelah sebelumnya naik peringkat dari posisi 33 dari 34 provinsi.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh kemiskinan terhadap IPM (indeks pembangunan manusia) di provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
3. Bagaimana UMR (Pengaruh Upah Minimum Regional) terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di provinsi Nusa Tenggara Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima di dalam bangku perkuliahan dan praktek di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan Kemiskinan, PDRB, dan Upah Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Bagi Pemerintah daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Daerah terutama dalam bidang Pembangunan manusia.